

## **ABSTRAK**

**ANDRE EKA PRATAMA.** NIM. E. 1911187. **Analisis Hukum Peranan Bagian Perencanaan Polres Bogor Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Kepolisian.** Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor. 2023.

Peraturan Kapolri Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penilaian Kinerja Anggota Polri dengan Sistem Manajemen Kinerja (SMK) mengatur tata cara pembuatan sistem kinerja anggota kepolisian yang meliputi perencanaan kinerja, pemantauan kinerja, pelaksanaan penilaian kinerja, dan evaluasi kinerja. Terdapat permasalahan tentang Sistem Manajemen Kinerja dimana kurangnya rasa inisiatif anggota kepolisian yang membuat SMK, sehingga perlu dilakukan evaluasi tentang berjalannya pembuatan SMK di Polres Bogor apakah terdapat peningkatan atau tidak. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang peranan Bagian Perencanaan Polres Bogor dalam meningkatkan akuntabilitas satuan kerja pengaturan tata kerja organisasi dan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan tata kerja organisasi dalam meningkatkan akuntabilitas satuan kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis empiris yaitu membahas permasalahan hukum di lapangan dihubungkan dengan teori hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Bagian Perencanaan Polres Bogor dalam meningkatkan akuntabilitas satuan kerja yaitu dengan meningkatkan kemampuan sistem manajemen pada Bagian Perencanaan di Polres Bogor penerapan pelaksanaan penilaian kinerja personel dengan menggunakan Sistem Manajemen Kinerja Polri belum maksimal sesuai Peraturan Polri Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penilaian Kinerja Anggota Polri Dengan Sistem Manajemen Kinerja (SMK), sehingga kinerja dapat ditingkatkan.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Kinerja, Peranan.

## **ABSTRACT**

**ANDRE EKA PRATAMA**. NIM. E. 1911187. *Legal Analysis of the Role of the Planning Section of the Bogor Police in Improving the Performance Accountability of the Police Work Unit*. Thesis: Faculty of Law, University of Juanda Bogor. 2023.

*Kapolri Regulation Number 02 of 2018 concerning Performance Assessment of Polri Members with a Performance Management System (SMK) regulates procedures for creating a performance system for police officers which includes performance planning, performance monitoring, implementation of performance appraisals, and performance evaluations. There is a problem with the Performance Management System where there is a lack of sense of initiative by members of the police who make SMKs, so it is necessary to evaluate the progress of making SMKs at the Bogor Police, whether there is an increase or not. The purpose of writing this research is to find out and analyze the role of the Bogor Police Planning Section in increasing the accountability of work units in setting organizational work procedures and to knowing and analyzing the arrangements for organizational work procedures in increasing work unit accountability. The research method used is the empirical sociological juridical research method, namely discussing legal issues in the field in relation to legal theory. The results of the study show that the role of the Polres Bogor Planning Section in increasing the accountability of the work unit is by increasing the capability of the management system in the Planning Section at the Polres Bogor. The implementation of personnel performance assessments using the Polri Performance Management System has not been maximized in accordance with Polri Regulation Number 02 of 2018 concerning Performance Assessment of Polri Members with a Management System Performance (SMK), so that performance can be improved.*

*Keywords: Accountability, Performance, Role.*